

Penjahit Lokal Gigit Jari



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,14/06/2024

➤ **Pengadaan Batik Sekolah Perusahaan dari Malang**

BONTANG, TRIBUN – Pemberdayaan penjahit lokal dalam pengerjaan puluhan ribu seragam batik sekolah di Kota Bontang hanya isapan jempol belaka, setelah pemerintah memutuskan bekerja sama dengan penyedia jasa luar. Ongkos produksi menjadi pertimbangan pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan, pengadaan 33.370 seragam batik sekolah tak bisa dilaksanakan dengan memberdayakan penjahit lokal. Alasannya, ongkos produksi terlalu tinggi.

Menurut Bambang, dalam proyek pengadaan apapun bentuknya, pemerintah pasti akan mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH). “Kalau kita berpatokan dengan harga produksi di Bontang ongkosnya tinggi. Jadi kita pakai dari luar daerah,” kata Bambang saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6).

Namun Bambang tak bisa menjelaskan berapa perbandingan biaya produksi lokal dan luar daerah yang dimaksud. “Saya lupa rinciannya,” ungkapnya.

Diketahui, untuk pengadaan baju batik sekolah tahun ini, pemerintah mengucurkan anggaran senilai kurang lebih Rp12 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 pos anggaran. Pertama Rp8,7 miliar untuk baju sebanyak 24.212 *pieces* (pcs), dan kedua senilai Rp3,3 miliar untuk 9.156 pcs.

Batik yang dipilih adalah batik khas Bontang dipakai pelajar setiap hari kamis.

Warna baju itu nantinya ada dua jenis, yaitu coklat tua bagi siswa SD dan coklat muda bagi siswa SMP. Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan dari hasil lelang pada sistem E-Katalog, perusahaan yang berkontrak berasal dari Kota Malang.

Mereka menyanggupi menyediakan sebanyak 33.370 seragam batik sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Seragam itu ditarget rampung sampai Agustus 2024. "Kita yang jelas sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang dilanggar," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bontang mengucurkan Rp15,5 miliar lebih anggaran daerah untuk pengadaan seragam sekolah tahun ini. Mengutip data yang terbit dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Bontang.

Tercatat dengan anggaran tersebut pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan mengadakan 42.502 *pieces* (pcs) paket seragam gratis bagi pelajar ini terdiri dari tas, baju lengkap, dan sepatu.

Pengadaan ini terbagi dalam dua judul besar, yaitu seragam batik sekolah dan seragam siswa kecil. Terinci asumsi pembelajaran pemerintah ini kemudian dibagi kembali dalam 2 pos mata anggaran dengan judul seragam seragam siswa kecil (pertama) dengan nilai Rp1,8 miliar untuk total 4.707 pcs seragam. Kedua anggaran Rp1,7 miliar untuk total 4.427 pcs.

Kemudian untuk pengadaan seragam batik sekolah juga dibagi dalam 2 pos anggaran. Pertama Rp8,7 miliar untuk sebanyak 24.212 pcs. Kedua senilai Rp3,3 miliar untuk 9.156 pcs. Penting diketahui belanja daerah untuk seragam sekolah 2024 naik 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang nilai hanya Rp 5 miliar.

Dikonfirmasi terkait tersebut, Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan untuk pengadaan seragam sekolah kali ini, pemerintah menambah seragam batik. "Penambahannya pada seragam batik, nilai kurang lebih Rp 12 miliar," kata Bambang, Rabu (20/3).

Ia menjelaskan untuk proyek pengadaan menggunakan skema E-Katalog. Jenis kain batik yang digunakan ialah motif jaring. Motif itu merupakan hasil sayembara yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) beberapa waktu silam. Menurut Bambang yang membedakan seragam batik untuk SMP dan SD ialah warna.

Rencananya seragam gratis ini akan dibagikan pada Tahun Ajaran baru. Disdikbud juga berharap penyedia yang berkontrak nanti bisa memberdayakan penjahit lokal. Makanya saat pelaksanaan negosiasi akan ditekankan melalui percakapan antara pihak Disdikbud dan penyedia. "Kalau pemberdayaan tetaplah kita upayakan," bebernya.

Terpisah, Wali Kota Bontang Basri Rase menegaskan kegiatan pengadaan seragam sekolah, harus diupayakan memberdayakan penjahit lokal. Menurutnya dengan cara itu, pemerintah berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM, yang bergelut dalam bisnis jahitan. "Semangat kami pemberdayaan UMKM," kata Basri saat ditemui di Pendopo Wali Kota.

Terkait upah kerja, menurut Basri bisa disesuaikan. “Harga pasti ada selisih. Makanya saya sudah minta Disdik ini rampungkan RABnya,” terangnya.

Lebih lanjut, Basri meminta Disdikbud bisa mempercepat secara teknis penyaluran seragam sekolah gratis ini. “Harus bisa cepat. Tahun Ajaran baru sebentar lagi ini,” pungkasnya. (mrd)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Penjahit Lokal Gigit Jari, 14/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
2. Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Gerakan *Bena* dan Beli Produk Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) *Bena* produk daerah diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran, dan penggunaan produk.
 - (2) Membeli produk daerah dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah baik dalam bentuk barang atau jasa.